

BAB IV

STRATEGI PEREKONOMIAN MYANMAR PASCADEMOKRATISASI TAHUN 2012-2017

A. Reformasi Ekonomi Tahun 2012-2017

Pascademokratisasi Pemerintah Myanmar mengeluarkan sasaran perekonomian dalam *five-year plan*. Pertumbuhan GDP diproyeksikan mencapai 7,7% pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 6,1% dari sektor industri. Selain pertumbuhan GDP, sasaran perekonomian lain dari Myanmar adalah meningkatkan *human capacity*, modal finansial, teknologi, dan investasi asing.⁹¹

1. *Poverty Allevation Strategy*

Presiden Thein Sein menekankan bahwa di Myanmar, 70% populasi berasal dari daerah rural dan merupakan pekerja yang berkaitan dengan agrikultur dan peternakan. Oleh karena itu, meningkatkan produksi barang dan pembangunan ekonomi di rural area akan menjadi motor untuk pembangunan ekonomi nasional. Dengan pembangunan ekonomi di rural area, maka akan terjadi pengurangan tingkat kemiskinan.⁹² Presiden Thein Sein juga menyatakan keinginannya untuk meningkatkan partisipasi asing dalam perekonomian, dengan mengatakan bahwa upaya mengurangi kemiskinan akan memerlukan 'hibah internasional, bantuan, pinjaman, dan teknisi-teknisi ahli.'⁹³

⁹¹ Qingrun, Song. 2013. *Myanmar's Economic Reforms and Development: Prospect and Challenges*. Analysis Paper, Stockholm: Institute for Security and Development Policy. Hlm. 3

⁹² *Ibid*

⁹³ Fuller, Thomas. 2012. *Myanmar President Announces New Reforms*. 19 Juni. Diakses Mei 19, 2018.

Dr. U Myint dalam tulisannya yang berjudul 'Reducing Poverty in Myanmar: the Way Forward' dalam Workshop on Rural Development and Poverty in Myanmar di bawah pemerintahan Thein Sein menyatakan pandangannya dalam hubungan antara *growth* dan *poverty*. Dengan memandang pada pengalaman negara-negara Asia Timur yang berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap buruh. Di sisi lain, memfokuskan perekonomian untuk mengurangi kemiskinan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Dengan mengurangi kemiskinan, maka pendapatan pekerja akan meningkat dan memperbaiki *labour productivity*, yang akan mendorong terjadinya pertumbuhan.⁹⁴

a. Agricultural Loans

Salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan adalah dengan melalui *agricultural loans*. Pascademokratisasi mulai dilakukan reformasi peraturan yang memungkinkan terjadinya *agricultural loans* bagi petani agar terbebas dari utang. Selain itu, pinjaman juga akan diberikan bagi para petani untuk membeli peralatan pertanian dan membantu dengan menjual mesin-mesin pertanian yang kompetitif.

Proses pemberian bantuan ini bersifat *private-public partnership*. Myanmar melalui

<https://www.nytimes.com/2012/06/20/world/asia/myanmar-president-announces-new-reforms.html>

⁹⁴ Myint, U. 2011. "Reducing Poverty in Myanmar: the Way Forward." Workshop paper, Naypyitaw

The Myanmar Agricultural Development Bank akan bekerja sama dengan Japan Internasional Cooperation Agency yang akan mendampingi proyek ini. Proyek ini akan dimulai pada tahun 2017-18 dan ini merupakan proyek jangka panjang selama 40 tahun.

Myanmar memberikan kesempatan bagi seluruh perusahaan yang menjual mesin atau alat pertanian untuk memasarkan barangnya dengan catatan latar belakang yang baik dari tiap perusahaan agar persaingannya terjadi secara adil. Dengan mengedepankan *privat-public partnership*, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi bank-bank swasta untuk berpartisipasi. Hal ini juga dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Myanmar Agricultural Development Bank.⁹⁵

Pemberian pinjaman dan pengurangan angka kemiskinan di daerah pedesaan juga bertujuan untuk menarik dan meningkatkan investasi asing di wilayah tersebut. Hal ini menjadi salah satu sasaran perekonomian di bawah pemerintahan Thein Sein yang mulai dijalankan setelah resmi menjabat.

b. Peningkatan Pendapatan dan Mata Pencaharian serta Penyediaan Pasar Domestik

Pada tahun 2013, Menteri Keuangan dan Pendapatan (*Minister of Finance and Revenue*) mengumumkan bahwa akan

⁹⁵ Aung, Sithu. 2017. *Myanmar Agricultural Development Bank to loans farmers for buying agricultural equipment*. 24 Juli. Diakses Mei 14, 2018. <http://elevenmyanmar.com/local/10698>

dilakukan kenaikan gaji bagi *civil servants* dan menentukan gaji minimal bagi pekerja industri per April 2013. Pemerintah menekankan pentingnya *people-centered development*, termasuk melalui peningkatan pendapatan rumah tangga individu.

Presiden Thein Sein juga menjanjikan distribusi sumber daya akan diprioritaskan untuk pasar domestik terlebih dahulu sebelum dijadikan komoditas ekspor. Contoh dari sumber daya yang dijanjikan adalah gas alam yang memang merupakan sumber daya alam utama Myanmar. Pemerintahan Thein Sein juga melakukan pemotongan suplai listrik bagi sektor industri dan dialihkan untuk rumah tangga. Selain itu, pemerintah Myanmar juga meminta perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk menurunkan harga kartu selular agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Anggaran pambangunan negara pun banyak diarahkan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, rel kereta, dan bandara yang bertujuan untuk mempermudah mobilitas sehari-hari masyarakatnya.⁹⁶

2. Foreign Direct Investment Law 2012

Presiden Thein telah melakukan reformasi ekonomi dan politik yang mengajak negara-negara Barat untuk menunda atau membatalkan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Myanmar. Hal ini dikarenakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan membuat Myanmar memiliki utang yang sangat besar dan juga terjadi kekurangan modal dan pengetahuan untuk

⁹⁶ Qingrun, Song. 2013. Op.cit

meningkatkan pertumbuhannya. Oleh karena itu, Myanmar berusaha untuk menarik investasi asing (FDI) yang merupakan sebuah keharusan dalam mengembangkan perekonomiannya. Pascademokratisasi, Myanmar mulai berusaha untuk menarik investasi asing dari ASEAN, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan negara-negara lain.⁹⁷

Di samping melakukan pendekatan dengan negara-negara investor untuk melakukan investasi asing di dalam negeri, Myanmar juga melakukan reformasi untuk mempermudah proses masuknya investasi asing. Pada tahun 2012, Myanmar melakukan reformasi peraturan investasi asing dengan menerbitkan Myanmar New Foreign Investment Law. Peraturan ini menggantikan hukum investasi asing lama sejak tahun 1988.

Dengan dikeluarkannya New Foreign Investment Law tahun 2012, Myanmar memberikan kelonggaran peraturan bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Myanmar. Kelonggaran peraturan terlihat pada beberapa indikator seperti jenis perusahaan, sektor yang dilarang, dan jaminan bagi investor-investor asing. (lihat lampiran tabel 4.1)

3. Foreign Direct Investment Law 2016

Pada tahun 2016 Myanmar kembali mengeluarkan Hukum Investasi Asing baru menggantikan peraturan investasi asing tahun 2012. Hukum ini mengalami beberapa perubahan dari segi penyusunan peraturan dan dari segi proses pelaksanaan. Secara garis besar, perbedaan antara hukum tahun 2012 dan 2016 ada pada perbaikan

⁹⁷ *Ibid*

konsepsi peraturan dan penyederhanaan aturan mengenai izin dari Myanmar Investment Committee (MIC).

Pada FIL tahun 2016, kualitas dari konsepsi FIL mengalami peningkatan. FIL tahun 2016 menghilangkan banyak kata atau ungkapan yang tidak diperlukan dan *poorly phrased*. Hukum ini lebih sederhana dengan tata bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Dari segi substansi, terjadi perubahan dengan menyederhanakan proses mendapatkan izin dari MIC. Dalam FIL tahun 2012 seluruh perusahaan asing harus melalui proses seleksi oleh MIC. Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan besar dan kecil. Namun, proses ini masih memakan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Jangka waktu yang cukup lama ini membuat investor mengalami kerugian dengan melakukan konsultasi dengan firma-firma hukum berkali-kali dalam proses persiapan penyusunan proposal.⁹⁸

Kekurangan dalam FIL 2012 digantikan dengan aturan baru yang menyatakan bahwa MIC mengeluarkan dua kategori baru, yakni MIC Permit dan MIC Approval. MIC Approval adalah izin bagi perusahaan kecil untuk proyek-proyek investasi kecil di Myanmar. Sedangkan untuk proyek-proyek investasi besar dengan kategori yang ditentukan MIC masih harus mendapatkan izin dari MIC. Keberadaan MIC Approval memberikan kemudahan bagi proyek

⁹⁸Carteret, D. D. (2016, Oktober 14). *New investment law will make it easier to do business in Myanmar: MIC*. Diambil kembali dari Myanmar Times: <https://www.mmtimes.com/business/23104-new-investment-law-will-make-it-easier-to-do-business-in-myanmar-mic.html>

investasi skala kecil karena syarat yang diperlukan tidak sebanyak MIC Permit. (lihat lampiran tabel 4.2)

4. Privatisasi

Pemerintah Thein Sein telah memprioritaskan privatisasi *state-owned enterprises* (SOEs), dikarenakan banyak dari SOEs menghabiskan cukup banyak uang pemerintah. Sebagian besar SOEs tidak menguntungkan pemerintah dan menghabiskan banyak subsidi negara. Keadaan ini diperparah dengan tingginya tingkat korupsi yang masih menjadi masalah dalam negeri.⁹⁹

Langkah ini dimulai sejak tahun 2012, ketika pemerintah Myanmar mulai mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungan SOEs terhadap dukungan pemerintah dan membuat mereka lebih kompetitif melalui program *joint ventures*. Langkah ini termasuk mengurangi anggaran subsidi untuk keperluan barang-barang mentah bagi SOEs. Pemerintah Myanmar mulai mengarahkan perusahaannya menjadi *public-private partnership*, korporatisasi, dan privatisasi.

Di tahun 2013, pemerintah Myanmar memberntuk komite pusat yang terdiri dari 27 anggota dan dikepalai langsung oleh Presiden Thein Sein. Komite pusat ini bertugas untuk membuat hukum, regulasi, dan prosedur untuk pembangunan *small and medium-sized enterprises* (SME). Komite ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah dan bank swasta menyediakan modal finansial untuk pembangunan, organisasi lokal dan asing dapat memenuhi persyaratan teknis, dan sumber daya manusia terpelihara dengan efisien.

Pemerintah Myanmar sangat mengejar privatisasi SOEs, melonggarkan kontrol negara dalam

⁹⁹ *Ibid*

sektor telekomunikasi, energi, keuangan, di antara sektor-sektor lain. Pemerintah juga berupaya untuk membangun lingkungan yang cocok untuk sektor swasta melakukan reformasi yang lebih dinamis.

Pada tahun 2016, NLD menunjuk anggota-anggota baru yang termasuk ke dalam Privatization Commission yang dikepalai oleh Wakil Presiden Myanmar. Menteri Perencanaan dan Keuangan menjabat sebagai sekretaris. Privatisasi yang diatur oleh komisi ini dapat mengambil beberapa bentuk, seperti: *system-sharing*, *public-private partnership*; waralaba (*franchise*), *joint-venture*; dan perdagangan aset yang sesuai standar yang diikuti negara-negara lain.¹⁰⁰

Proses diskusi dan perencanaan privatisasi ini berlanjut hingga tahun 2017 ketika pemerintahan berada di bawah Presiden Htin Kyaw. Pada tahun 2017, mulai didiskusikan mengenai peraturan privatisasi bagi pabrik dan *workshops* milik negara, selain yang penting secara strategis. Pabrik-pabrik dan *workshops* milik negara direncanakan akan dihentikan secara keseluruhan, dilanjutkan sebagai milik negara, atau diprivatisasi.

Pemerintah membuka kesempatan bagi pihak dari dalam dan luar negeri untuk menjalankan perusahaan yang mereka inginkan. Setelah status dari pabrik-pabrik dan *workshops* selesai ditentukan, para pekerja yang berasal dari pabrik dan *workshops* tersebut diizinkan untuk bekerja bagi kementerian atau ditransfer menuju perusahaan swasta berdasarkan kemampuan dan pengalamannya.

¹⁰⁰ Export.gov. 2017. *Burma - 7-State-Owned Enterprises*. 25 Juli. Diakses Mei 18, 2018. <https://www.export.gov/article?id=Burma-state-owned-enterprises>

Menteri Perencanaan dan Keuangan pada saat itu, Kyaw Win, mengatakan bahwa “*a government doesn't need to do business for the development of a country. It only need to make laws, rules, and regulations to support the development. If we continue running those loss-makin industries, the losses will simply increased.*”¹⁰¹

Proses ini mendorong terjadinya kompetisi di sektor-sektor bisnis tertentu. Berbagai lapangan pekerjaan mulai bermunculan dan efisiensi dalam perekonomian semakin meningkat. Masyarakat diuntungkan karena terjadi pemasangan harga yang kompetitif serta peningkatan pelayanan dan jasa. Direncanakan ke depannya akan ada lebih banyak SOEs yang diprivatisasi dengan tujuan untuk meningkatkan sektor swasta.¹⁰²

5. Integrasi terhadap Sistem Ekonomi Internasional

Saat berada di bawah rezim SLORC dan SPDC, Myanmar sudah terlibat dalam perekonomian internasional dalam lingkup terbatas. Kegiatan perekonomian internasional Myanmar masih didominasi oleh kerja sama regional meskipun ada organisasi yang sifatnya lebih mengglobal.

Pada Januari 1995, Myanmar sudah menjadi anggota World Trade Organization (WTO).¹⁰³ Secara bertahap Myanmar mulai membuka diri untuk terlibat

¹⁰¹ ElevenMyanmar. 2017. *Myanmar to privatize state-owned factories and workshops*. 21 Maret. Diakses Mei 18, 2018. <http://elevenmyanmar.com/business/8403>.

¹⁰² Qingrun, Song. 2013. Loc.cit hlm. 4

¹⁰³ WTO. t.thn. *Myanmar and the WTO*. Diakses Mei 21, 2018. https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/myanmar_e.htm

dalam sistem perekonomian global. Kemudian Myanmar juga sudah terlibat dalam perjanjian perdagangan dalam AFTA pada tahun 1997 ketika bergabung dengan ASEAN. Dengan bergabung dengan ASEAN, Myanmar juga berpartisipasi dalam *preferential agreements* dengan negara-negara seperti Australia, Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan.¹⁰⁴ Melalui ASEAN juga Myanmar terlibat dalam kerja sama dengan Selandia Baru dalam ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement yang bertujuan untuk melakukan liberalisasi dan memfasilitasi perdagangan barang dan jasa antara negara-negara anggota. Selain dengan Australia dan Selandia Baru, ASEAN juga membuat Myanmar mengikuti kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa melalui EU-ASEAN Cooperation Agreement framework.¹⁰⁵

Program perekonomian multilateral lain yang diikuti oleh Myanmar adalah Greater Mekong Sub-Region (GSM) programme. Program ini sudah diikuti Myanmar sejak tahun 1992 bersama Kamboja, Tiongkok (Provinsi Yunnan dan Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang), Laos, Thailand, dan Vietnam.¹⁰⁶

¹⁰⁴ intracen.org. t.thn. *Myanmar: Domestic and Foreign Market Access*. Diakses Mei 21, 2018.

<http://www.intracen.org/country/Myanmar/Domestic-and-Foreign-Market-Access/>

¹⁰⁵ CharltonsMyanmar.com. t.thn. *Myanmar Trade Agreements*. Diakses Mei 21, 2018.

<https://www.charltonsmyanmar.com/myanmar-economy-3/international-agreements-and-memberships/>

¹⁰⁶ Greatermekong.org. (t.thn.). *About the Greater Mekong Subregion*. Dipetik Mei 21, 2018, dari <http://greatermekong.org/about>

GMS adalah area ekonomi alami yang dibentuk oleh Sungai Mekong yang mencakup wilayah seluas 2,6 juta m² dan dengan populasi sebanyak 326 miliar. Program ini mendapatkan asistensi dari Asian Development Bank (ADB) dalam upaya GSM untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara negara-negara anggota.¹⁰⁷

Kerja sama perekonomian lain yang diikuti Myanmar adalah The Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). BIMSTEC adalah organisasi regional yang diikuti oleh Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Myanmar. Organisasi ini dibentuk pada tahun 6 Juni 1997. Myanmar menjadi anggota resmi pada 22 Desember 1997.

Di bawah rezim sipil, khususnya rezim Presiden Thein Sein, Myanmar semakin berupaya untuk semakin terlibat dalam sistem perekonomian internasional. Myanmar mulai berupaya mengadakan perjanjian internasional bilateral dan multilateral dengan negara yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Selain itu, kerja sama perekonomian regional Myanmar pun semakin ditingkatkan, termasuk dalam GMS dan juga ASEAN.

Di tahun 2015, Myanmar mulai mengintegrasikan perekonomiannya dalam ASEAN Economic Community (AEC) yang sudah diadopsi sejak cetak biru AEC dikeluarkan tahun 2007. Keikutsertaan Myanmar dalam AEC dianggap oleh sebagian *think tank* dalam negeri belum diikuti dengan kesiapan yang baik. Myanmar masih perlu meningkatkan infrastruktur yang tertinggal jauh dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

¹⁰⁷ ADB. t.thn. *Greater Mekong Subregion (GMS)*. Diakses Mei 21, 2018. <https://www.adb.org/countries/gms/main>

B. Perubahan Hubungan Bilateral Perekonomian Myanmar dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa

1. Hubungan Bilateral Myanmar dan Tiongkok

Setelah demokratisasi, pemerintah Myanmar mulai berupaya untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Ketika berada di bawah pemerintahan Thein Sein, Myanmar dianggap berupaya untuk mengalihkan negaranya dari ketergantungan berlebihan dengan Tiongkok. Keberadaan Tiongkok dianggap telah memanfaatkan pilihan isolasionis Myanmar pada saat itu. Oleh karena itu, Myanmar secara perlahan mulai beralih dengan mendekati negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.¹⁰⁸

Pada September 2011, Presiden Thein Sein membatalkan kerja sama pembangunan Bendungan Myitsone (Myitsone Dam) yang sudah dimulai sejak tahun 2006. Bendungan ini adalah bendungan terbesar dari delapan bendungan yang direncanakan Tiongkok di sepanjang Sungai Irrawaddy. Pembangunan ini mendapat tentangan dari peneliti, aktivis, dan media dalam negeri yang menyoroti dampak lingkungan, ekonomi, dan kemanusiaan yang mungkin timbul dari pembangunan ini. Mereka yang menolak juga menyerukan pentingnya melindungi Sungai Irrawaddy yang merupakan jalur air terpenting di Myanmar.

Penolakan dari masyarakat menjadi faktor tambahan selain pertimbangan strategis dan ekonomis, termasuk kerugian potensial bagi ekonomi agraris di bagian hilir, bagi Presiden Thein Sein dalam mengambil keputusan pembatalan pembangunan bendungan. Sebagian berpendapat bahwa pembatalan ini juga merupakan

¹⁰⁸ Zin, Min, and Brian Joseph. 2012. Loc.cit Hlm. 109

indikasi dari perhatian di dalam pemerintahan mengenai pengaruh Tiongkok di Myanmar.

Keputusan terhadap pembangunan Bendungan Myitsone memberikan sinyal perubahan sikap terhadap peran Tiongkok di Myanmar, tetapi tidak dengan maksud untuk memutuskan hubungan. Hal ini terlihat dari masih besarnya ketergantungan Myanmar terhadap Tiongkok secara ekonomi, strategis, dan politik, tanpa ada niatan untuk mengonfrontasi sedikit pun.¹⁰⁹

Walaupun pengaruh Tiongkok di Myanmar mengalami penurunan seiring masuknya pengaruh Barat, Tiongkok dan Myanmar masih menjalankan hubungan bilateral yang cukup signifikan. Tiongkok masih memberikan pinjaman kepada Myanmar dan telah disetujui oleh Parlemen Myanmar. Selain itu, Tiongkok masih menguasai investasi asing dengan sekitar 32% dari total keseluruhan investasi asing berasal dari Tiongkok. Kerja sama Myanmar-Tiongkok berfokus pada pendirian *special economic zones*, pembangunan rute transportasi, dan perluasan jaringan pipa minyak dan gas alam.¹¹⁰

2. Hubungan Bilateral Myanmar dan Amerika Serikat

Sebagai negara yang cukup dominan memberikan tekanan agar Myanmar melakukan reformasi, Amerika Serikat kemudian dengan cepat memberikan respon dan tawaran kerja sama perekonomian dan reformasi hubungan kedua negara. Myanmar yang berupaya memperbaiki hubungan dengan Barat pun menyetujui tawaran kerja sama dari Amerika Serikat.

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Aung-Thwin, Maitrii. 2014. "MYANMAR IN 2013: Intergration and the Challenge of Reform." *Southeast Asian Affairs* hlm. 211, 217.

a. *Hubungan Bilateral Bidang Non-ekonomi*

Proses reformasi hubungan bilateral diawali dengan melanjutkan hubungan diplomatik antara Myanmar-AS pada Januari 2012. Melalui kunjungan Secretary of State, Hillary Clinton, Amerika menyatakan bahwa akan memberikan dukungan dan mendorong pemerintahan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah besar dalam melakukan reformasi. Walau pun pada awalnya belum ada rencana dari Amerika untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar.¹¹¹

Hillary Clinton dalam kunjungannya mengatakan bahwa Amerika Serikat akan segera memproses pertukaran duta besar dengan Myanmar. Perubahan ini oleh Presiden Barack Obama dianggap sebagai sebuah “*substantial step forward*”. Sebelumnya, Amerika Serikat menarik duta besarnya untuk Myanmar pada tahun 1990, setelah rezim militer menolak hasil pemilihan umum yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partai NLD.¹¹²

¹¹¹ Myers, Steven Lee, dan Seth Mydans. 2012. *U.S. Restores Full Ties to Myanmar After Rapid Reforms*. 13 Januari. Diakses Mei 19, 2018.

<https://www.nytimes.com/2012/01/14/world/asia/united-states-resumes-diplomatic-relations-with-myanmar.html>

¹¹² BBC. (2012, Januari 13). *US to exchange ambassadors with Burma*. Diambil kembali dari BBC: <http://www.bbc.com/news/world-asia-16554415>

b. *Hubungan Bilateral Bidang Ekonomi*

Proses kerja sama perekonomian dimulai dengan mengangkat sanksi ekonomi yang pernah dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Pengangkatan sanksi dilakukan pada Februari 2012. Amerika Serikat melakukan ‘*targeted easing*’ untuk pelarangan-pelarangan terhadap Myanmar. Perwakilan dari Amerika Serikat mengatakan bahwa sektor agrikultur, pariwisata, telekomunikasi, dan perbankan adalah sektor yang akan dipertimbangkan dalam pengangkatan sanksi. Selain itu, Amerika Serikat mengatakan bahwa sanksi ekonomi akan tetap dijatuhkan pada individu dan institusi yang tetap menolak upaya reformasi. Sanksi-sanksi lain yang diangkat oleh Amerika Serikat adalah sektor investasi dan layanan finansial.¹¹³

Myanmar masih berupaya untuk mempererat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2016, Aung Sang Suu Kyi, yang menjadi perwakilan pemerintah Myanmar mengunjungi Amerika Serikat dan mengadakan pertemuan dengan Presiden Barack Obama. Suu Kyi menyatakan kondisi Myanmar yang membutuhkan dukungan teknis untuk sektor ekonomi.

Pada September 2016, Presiden Barack Obama dan State Counsellor Aung San Suu Kyi mengeluarkan program U.S.-Myanmar Partnership untuk meningkatkan kerja sama berdasarkan *mutual respect* dan *common interests*. Partnership ini akan meningkatkan hubungan bilateral di bidang politik, diplomatik, perdagangan dan kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang-bidang lainnya.

¹¹³ Harvey, Rachel. 2012. *US to ease sanctions against Burma*. 5 April. Diakses Mei 19, 2018. <http://www.bbc.com/news/world-asia-17619519>

Dalam upayanya memperdalam hubungan perekonomian bilateral, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah portofolio baru untuk program bantuan bagi Myanmar yaitu Development Credit Authority (DCA). DCA adalah program jaminan pinjaman yang memobilisasi pinjaman lebih dari 10 juta dolar AS. Program ini menarget usaha-usaha mikro, kecil, dan medium di bidang agrikultur, peternakan, dan perdagangan dan *post-production services*. Sebagian besar dari perusahaan yang ditargetkan diharapkan dimiliki atau dioperasikan oleh perempuan.¹¹⁴

3. Hubungan Bilateral Myanmar dan Uni Eropa

Uni Eropa telah menjadi organisasi internasional terdepan dalam proses *re-engagement* Myanmar ketika membuka diri dengan sistem internasional. Uni Eropa mengatakan bahwa mereka akan berkomitmen untuk mendukung Myanmar dan masyarakatnya menuju negara yang demokratis, damai, dan makmur. Ketika Myanmar melakukan reformasi, Uni Eropa merupakan pihak yang dengan cepat merespon penuh dan memberikan dukungan.

a. Hubungan Bilateral Bidang Non-Ekonomi

Satu tahun setelah proses transisi dimulai, Uni Eropa mulai menunjukkan upayanya untuk melakukan reformasi hubungan dengan Myanmar. Uni Eropa mendirikan sebuah kantor resmi dan mengirimkan delegasi penuh untuk bertempat di Myanmar. Tujuan

¹¹⁴ USEmbassy.gov. 2016. *U.S.-Burma Relations*. 15 September. Diakses Mei 19, 2018. <https://mm.usembassy.gov/u-s-burma-relations/>

dilakukannya hal tersebut adalah untuk merefleksikan ekspansi dan kepentingan hubungan kedua belah pihak. Uni Eropa berusaha menyediakan bantuan pembangunan dan kemanusiaan dengan mendirikan proyek-proyek yang mempromosikan stabilitas. Hal ini termasuk reformasi Myanmar Police Force, pendirian Myanmar Peace Center, dan juga pembentukan National Crisis Response untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya keadaan darurat nasional.¹¹⁵

Pada 2014, Uni Eropa dan Myanmar memulai untuk saling terlibat dalam Human Right Dialogue yang dikepalai oleh Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk masalah HAM. Dialog ini menggarisbawahi perhatian-perhatian Uni Eropa mengenai proses transisi demokratik dan isu hak asasi manusia di Myanmar. Di samping masalah transisi dan isu HAM, Uni Eropa juga memperhatikan masalah perlindungan *right of persons belonging* bagi etnis dan agama minoritas.

Myanmar dan Uni Eropa melakukan sebuah *joint communication* yang diberi nama “*Elements for an EU strategy vis-à-vis Myanmar/Burma: A Special Partnership for Democracy, Peace and Prosperity*” di bulan Juni 2016. *Joint communication* ini berisi pandangan ambisius dan *forward-looking* dari Uni Eropa terhadap hubungannya dengan Myanmar di beberapa sektor: demokrasi, *rule of law*, dan *good governance*; proses perdamaian; hak asasi manusia; pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.¹¹⁶

¹¹⁵ Aung-Thwin, Maitrii. 2014. Loc.cit. hlm. 212

¹¹⁶ Commission, E. (2016). *Elements for an EU strategy vis-à-vis Myanmar/Burma: A Special Partnership for Democracy, Peace, and*

b. Hubungan Bilateral Bidang Ekonomi

Sama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa memulai *re-engagement* dengan Myanmar melalui pengangkatan sanksi dan pembukaan kantor di Myanmar pada tahun 2012. Kemudian Uni Eropa mengangkat seluruh sanksi ekonominya kecuali embargo persenjataan.

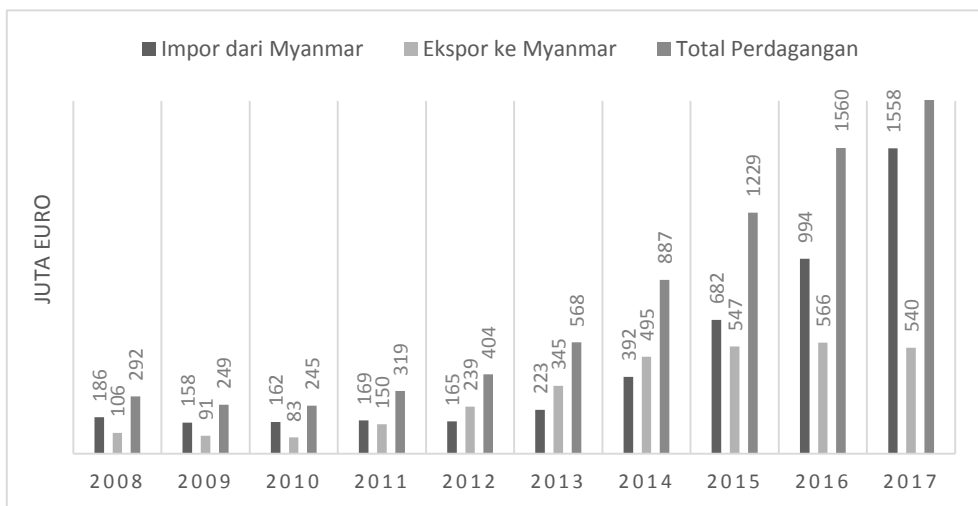
Uni Eropa memberlakukan skema perdagangan '*Everything But Arms*' (EBA) dalam kerja sama ekonomi dengan Myanmar. EBA adalah skema perdagangan Uni Eropa dengan *least developed countries* (LDCs) agar mereka mendapatkan *full duty-free and quota-free access* terhadap Uni Eropa dalam mengekspor semua produk-produknya kecuali persenjataan.

Di bawah skema EBA, perdagangan bilateral Myanmar-Uni Eropa mencapai 1,55 miliar Euro pada tahun 2016. Jumlah ini meningkat dari tahun 2012 yang menghasilkan 404 juta Euro saja. Ekspor utama dari Myanmar ke Uni Eropa adalah garmen, beras, dan alas kaki (lihat grafik 4.1). Setelah Myanmar dan Uni Eropa melakukan kerja sama ekonomi, pada tahun 2016 data statistik resmi dari Myanmar menunjukkan bahwa Uni Eropa adalah investor terbesar keempat. Kemudian pada akhir Januari 2017, jumlah investasi kumulatif dari Uni Eropa mencapai 4,8 miliar dolar AS dan menyumbang sebesar 8,2% dari total keseluruhan. Uni Eropa berada di belakang Tiongkok (31% dari total), Singapura (27%), dan Hong Kong (13%).

Myanmar dan Uni Eropa juga mulai bernegosiasi untuk membahas mengenai EU-Myanmar Investment Protection Agreement. Kesepakatan ini bertujuan untuk memungkinkan

bisnis-bisnis dari Eropa mengelola semua potensi-potensi yang ada di Myanmar, selagi dihadapkan dengan standar yang tinggi untuk masalah tanggung jawab perusahaan (CSR) dan investasi. *Sumber: European Union, Trade in Goods with Myanmar 2018*

Grafik 4. 1 Total Perdagangan Uni Eropa dan Myanmar Tahun 2008-2012



C. Kondisi Perekonomian Myanmar Pascademokratisasi Tahun 2012-2017

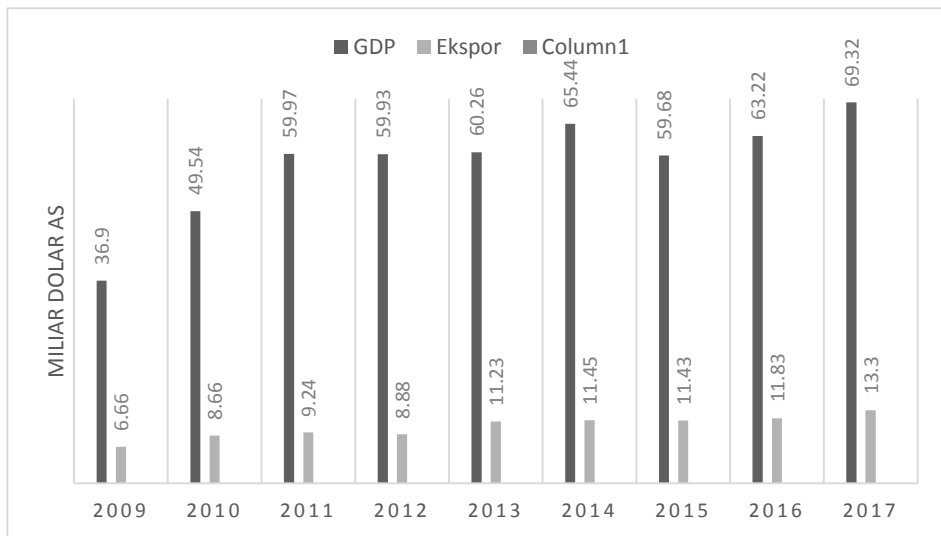
Dalam rentang waktu 2012 hingga 2017, Myanmar mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam perekonomiannya. Dalam beberapa indikator, seperti GDP, investasi asing, dan ekspor-impor, terjadi beberapa peningkatan, sebagai berikut:

1. GDP dan Ekspor Myanmar¹¹⁷

Pascademokratisasi, perekonomian Myanmar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu lima tahun (2012-2017), GDP Myanmar meningkat 10 miliar dolar AS, dari 59,93 miliar dolar AS menjadi 69,32 miliar dolar AS.

Dalam indikator lain, yakni ekspor, terjadi pula peningkatan pendapatan. Tidak begitu signifikan, karena produk ekspor Myanmar masih didominasi oleh komoditas yang harga di pasar internasional sering mengalami penurunan. (lihat grafik 4.2)

¹¹⁷ TradingEconomics. (n.d.). *Myanmar GDP*. Retrieved from Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/myanmar/gdp>; Statista.com. (t.thn.). *Myanmar: Export of goods from 2007 to 2017 (in billion U.S. dollars)*. Diambil kembali dari Statista: <https://www.statista.com/statistics/526523/export-of-goods-to-myanmar/>

Grafik 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Myanmar

Sumber: *TradingEconomics.com; Statista.com*

2. Investasi Asing¹¹⁸

Persentase investasi asing di Myanmar mengalami kenaikan dalam rentang waktu 2012-2017. Data dari World Bank menunjukkan kenaikan persentase investasi asing terhadap GDP Myanmar hingga 6,75%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya mencapai 2,92%. (lihat grafik 4.3)

¹¹⁸World Bank. (t.thn.). *Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)*. Diambil kembali dari World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=MM>

Grafik 4. 3 Persentase Investasi Asing Terhadap GDP Myanmar